



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan atau Tunjangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 43);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 15);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 4);
40. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 2.787.206.435.640,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.687.206.435.640,00
2. Belanja Daerah	Rp.	2.745.995.435.458,00
	Surplus/Defisit	Rp. (58.788.999.818,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	100.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	41.211.000.182,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 58.788.999.818,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 881.995.803.000,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.542.219.925.000,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 262.990.707.640,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 641.697.775.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 105.298.028.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. 20.000.000.000,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 115.000.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 58.206.459.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.183.725.491.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 300.287.975.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 116.346.200.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 114.334.048.640,00
 - c. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 32.310.459.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.260.795.923.078,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.485.199.512.380,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 1.204.669.708.974,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. | 1.592.985.000,00 |
| c. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 36.724.140.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 12.920.780.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 888.309.104,00 |
| f. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 4.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 91.393.008.805,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 866.800.110.526,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 527.006.393.049,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp. | 100.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. | 41.211.000.182,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. | 100.000.000.000,00 |
|---|-----|--------------------|
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| b. Pembayaran Pokok Hutang | Rp. | 26.211.000.182,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|---|
| Lampiran I | : Ringkasan APBD |
| Lampiran II | : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi |
| Lampiran III | : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
| Lampiran IV | : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD Program dan Kegiatan |
| Lampiran V | : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Perubahan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan |
| Lampiran VII | : Laporan Piutang Daerah |
| Lampiran VIII | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah |
| Lampiran IX | : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah |
| Lampiran X | : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain |
| Lampiran XI | : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini |
| Lampiran XII | : Daftar Dana Cadangan Daerah |
| Lampiran XIII | : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah |

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 9
**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT : 9/140/2019**

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Hal 1 dari 30

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	2.687.206.435.640,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	881.995.803.000,00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	641.697.775.000,00
4.1.1.01.	Pajak Hotel	42.000.000.000,00
4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima	597.950.000,00
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat	14.950.000.000,00
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	12.000.000.000,00
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	7.995.000.000,00
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu	2.700.000.000,00
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	3.655.000.000,00
4.1.1.01.12.	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah Kos	102.050.000,00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	53.000.000.000,00
4.1.1.02.01.	Restoran	28.980.000.000,00
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	13.030.200.000,00
4.1.1.02.03.	Kafetaria	5.635.000.000,00
4.1.1.02.05.	Katering	561.000.000,00
4.1.1.02.09.	Bofet	3.384.000.000,00
4.1.1.02.10.	Bakery	1.409.800.000,00
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	12.500.000.000,00
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop	3.675.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	63.000.000,00
4.1.1.03.05.	Pameran	10.000.000,00
4.1.1.03.07.	Karaoke	1.170.000.000,00
4.1.1.03.09.	Sirkus/Akrobat/Sulap	20.000.000,00
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar	560.000.000,00
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	56.000.000,00
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	3.800.000.000,00
4.1.1.03.16.	Panti Pijat/Refleksi	2.640.000.000,00
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	70.000.000,00
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	175.000.000,00
4.1.1.03.24.	Musik Room	36.000.000,00
4.1.1.03.25.	Tempat Rekreasi	225.000.000,00
4.1.1.04.	Pajak Reklame	12.000.000.000,00
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	5.200.000.000,00
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	2.699.458.925,00
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker	10.000.000,00
4.1.1.04.04.	Reklame Selebaran	8.330.000,00
4.1.1.04.06.	Reklame Udara	20.011.075,00
4.1.1.04.12.	Reklame Bersinar	3.990.000.000,00
4.1.1.04.13.	Reklame Kendaraan	72.200.000,00
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	126.000.000.000,00
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	126.000.000.000,00
4.1.1.07.	Pajak Parkir	3.200.000.500,00
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir.	3.200.000.500,00
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.	3.000.000.000,00
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet.	15.000.000,00
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.000.000.000,00
4.1.1.11.06.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.000.000.000,00
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	238.982.774.500,00
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	238.982.774.500,00
4.1.1.14.	Pajak Bumi dan Bangunan	100.000.000.000,00
4.1.1.14.01.	Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	100.000.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	105.298.028.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	45.916.682.100,00
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.428.351.850,00
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman	2.250.118.750,00
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	5.052.370.003,00
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	13.673.517.497,00
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.936.424.000,00
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.583.500.000,00
4.1.2.01.11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	724.400.000,00
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.760.000.000,00
4.1.2.01.14.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.508.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	29.841.345.900,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.386.325.000,00
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	1.543.298.400,00
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	127.735.000,00
4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	9.805.312.500,00
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.456.400.000,00
4.1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.522.275.000,00
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	29.540.000.000,00
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	28.500.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	80.000.000,00
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	760.000.000,00
4.1.2.03.06.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	200.000.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000,00
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	20.000.000.000,00
4.1.3.01.02.	BUMD	20.000.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.000.000.000,00
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	4.067.473.842,74
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	100.000.000,00
4.1.4.01.23.	Pendapatan Royalti	3.867.473.842,74
4.1.4.01.25.	Penjualan Gedung	100.000.000,00
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	6.500.000.000,00
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	6.500.000.000,00
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	7.500.000.000,00
4.1.4.03.01.	Pendapatan Bunga Deposito.	7.500.000.000,00
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	975.336.442,90
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang Daerah	975.336.442,90
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.800.000.000,00
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum	1.800.000.000,00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	9.158.026.680,36
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	300.000.000,00
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	200.000.000,00
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	263.000.000,00
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	70.000.000,00
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	70.000.000,00
4.1.4.07.10.	Pendapatan denda administrasi bagi notaris atau PPAT	15.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.1.4.07.11.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.184.042,36
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.488.842.638,00
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	193.735.000,00
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	65.000.000,00
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	128.735.000,00
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.450.000.000,00
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	2.000.000.000,00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.200.000.000,00
4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian Setoran	1.200.000.000,00
4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00
4.1.4.14.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
4.1.4.19.	Pendapatan dari Organisasi Kesehatan	37.640.480.534,00
4.1.4.19.09.	Penerimaan Pendidikan Kesehatan	386.354.000,00
4.1.4.19.11.	Pendapatan BPJS RSUD - LO	27.784.479.034,00
4.1.4.19.12.	Pendapatan Dari Pelayanan Kesehatan	9.469.647.500,00
4.1.4.20.	Pendapatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.500.000.000,00
4.1.4.20.01.	Lain-lain Pendapatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.500.000.000,00
4.1.4.21.	Pelayanan Transportasi	8.352.647.500,00
4.1.4.21.01.	Pelayanan Bus Rapid Transportation (BRT)	8.352.647.500,00
4.1.4.23.	Pendapatan dari rusunawa	1.257.300.000,00
4.1.4.23.01.	Pendapatan sewa rusunawa	1.257.300.000,00
4.1.4.25.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	32.000.000.000,00
4.1.4.25.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP.	32.000.000.000,00
4.1.4.26.	Pelayanan Parkir Meter	355.000.000,00
4.1.4.26.01.	Kontribusi Parkir Meter	355.000.000,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.542.219.925.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58.206.459.000,00
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	56.636.910.000,00
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.363.733.000,00
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	45.551.942.000,00
4.2.1.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PPh WPOPND)	3.721.235.000,00
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.569.549.000,00
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	23.892.000,00
4.2.1.02.15.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara	482.744.000,00
4.2.1.02.16.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	158.241.000,00
4.2.1.02.17.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	502.790.000,00
4.2.1.02.18.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	401.882.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.183.725.491.000,00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	1.183.725.491.000,00
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum.	1.183.725.491.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	300.287.975.000,00
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Reguler	65.551.749.000,00
4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	28.251.614.000,00
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	17.198.866.000,00
4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	19.602.249.000,00
4.2.3.01.10.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	412.394.000,00
4.2.3.01.18.	Dana Alokasi Khusus Bidang Sosial	86.626.000,00
4.2.3.03.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	21.075.720.000,00
4.2.3.03.01.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Jalan	376.156.000,00
4.2.3.03.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Irigasi	2.756.114.000,00
4.2.3.03.04.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.550.000.000,00
4.2.3.03.05.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	5.223.674.000,00
4.2.3.03.06.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Penyediaan Air Minum	3.029.658.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.2.3.03.07.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi	4.834.547.000,00
4.2.3.03.08.	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pariwisata	2.305.571.000,00
4.2.3.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	213.660.506.000,00
4.2.3.04.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	171.118.709.000,00
4.2.3.04.03.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.179.000.000,00
4.2.3.04.05.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	11.773.800.000,00
4.2.3.04.06.	Bantuan Operasional Kesehatan	13.200.509.000,00
4.2.3.04.08.	Akreditasi Puskesmas	1.682.975.000,00
4.2.3.04.09.	Jaminan Persalinan	1.644.952.000,00
4.2.3.04.10.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.612.956.000,00
4.2.3.04.11.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.037.743.000,00
4.2.3.04.12.	Bantuan Operasional Pendidikan dan Kesetaraan	6.295.700.000,00
4.2.3.04.13.	Dana Penguatan Kapasitas Fiskal Koperasi dan UKM	417.358.000,00
4.2.3.04.14.	Dana Pelayanan Kepariwisata	696.804.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	262.990.707.640,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	116.346.200.000,00
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	6.000.000.000,00
4.3.1.01.01.	Pemerintah	6.000.000.000,00
4.3.1.06.	Hibah Dana BOS	110.346.200.000,00
4.3.1.06.01.	Hibah Dana BOS SD	72.639.200.000,00
4.3.1.06.02.	Hibah Dana BOS SMP	37.707.000.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	114.334.048.640,00
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	114.334.048.640,00
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	25.858.339.046,00
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28.697.788.392,00
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.762.409.763,00
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	716.505.567,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	26.299.005.872,00
4.3.6.	Dana Insentif Daerah	32.310.459.000,00
4.3.6.01.	Dana Insentif Daerah.	32.310.459.000,00
4.3.6.01.01.	Dana Insentif Daerah..	32.310.459.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.687.206.435.640,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.	BELANJA DAERAH	2.745.995.435.458,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.260.795.923.078,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.204.669.708.974,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.017.699.264.372,87
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	532.630.613.370,69
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	51.413.498.183,14
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	11.682.462.900,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	30.907.889.844,50
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.741.199.150,70
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	28.214.218.050,10
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	752.004.285,58
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	10.740.855,63
5.1.1.01.10.	Uang Paket 2)	86.058.000,00
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	32.703.300,00
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi 2)	55.906.200,00
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran 2)	33.799.500,00
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7.856.100,00
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	58.235.625,00
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan 2)	6.066.360.000,00
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian 2)	143.430.000,00
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.1.01.21.	Iuran BPJS Kesehatan	21.479.810.203,60
5.1.1.01.23.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	187.000.000.000,00
5.1.1.01.24.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.987.387.500,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.583.866.427,77
5.1.1.01.26.	Iuran Jaminan Kematian	4.503.915.734,19
5.1.1.01.27.	Tunjangan Transportasi	6.396.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.1.01.28.	Tunjangan Reses	1.984.500.000,00
5.1.1.01.29.	Tunjangan Hari Raya	61.284.415.791,18
5.1.1.01.30.	Gaji Ketiga Belas	61.249.273.350,79
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	143.479.448.294,69
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	118.365.590.426,20
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	705.600.000,00
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	3.658.605.368,49
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	2.064.000.000,00
5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	18.685.652.500,00
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.260.993.704,50
5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.1.03.02.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.322.993.704,50
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	30.564.031.778,50
5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	30.564.031.778,50
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.665.970.823,44
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	3.665.970.823,44
5.1.2.	Belanja Bunga	1.592.985.000,00
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	1.592.985.000,00
5.1.2.01.04.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	1.592.985.000,00
5.1.4.	Belanja Hibah	36.724.140.000,00
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	2.580.000.000,00
5.1.4.01.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah.	2.580.000.000,00
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Masyarakat	26.012.440.000,00
5.1.4.04.01.	Belanja Hibah kepada Masyarakat.	26.012.440.000,00
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	8.131.700.000,00
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.	8.131.700.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	12.920.780.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan /atau Keluarga	12.630.780.000,00
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan /atau Keluarga yang direncanakan.	11.630.780.000,00
5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan /atau Keluarga yang tidak direncanakan	1.000.000.000,00
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	290.000.000,00
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan.	290.000.000,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	888.309.104,00
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	888.309.104,00
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Demokrat	104.970.511,00
5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	177.337.261,00
5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional (PAN)	137.921.761,00
5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya (GOLKAR)	56.073.511,00
5.1.7.05.07.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	53.681.761,00
5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Gerindra	220.337.016,00
5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	53.391.511,00
5.1.7.05.10.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	42.107.761,00
5.1.7.05.12.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Berkarya	42.488.011,00
5.1.8.	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00
5.1.8.01.	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00
5.1.8.01.01.	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.485.199.512.380,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	91.393.008.805,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.461.712.500,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.533.855.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.254.450.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Reviu Pengawasan	705.750.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Tim Pemeriksaan dan Pengawasan	40.950.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Entri Data	374.190.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.01.07.	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.059.492.500,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit	194.100.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Pengelola Pengumpul Data	304.350.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Panitia Penghapusan	138.000.000,00
5.2.1.01.12.	Honorarium Panitia Penilai/ Penaksir	161.500.000,00
5.2.1.01.13.	Honorarium Panitia Penjualan	123.600.000,00
5.2.1.01.14.	Honorarium Panitia Tim Penilai Resiko	19.200.000,00
5.2.1.01.16.	Honorarium Panitia Pengadaan Tanah	22.100.000,00
5.2.1.01.17.	Honorarium Tim Penertiban Bangunan	74.250.000,00
5.2.1.01.18.	Honorarium Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	137.350.000,00
5.2.1.01.21.	Honorarium Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	11.500.000,00
5.2.1.01.22.	Honorarium Tim Penyelesaian Lahan	159.000.000,00
5.2.1.01.23.	Honorarium Tim Pengawasan Penghuni Rusunawa	43.125.000,00
5.2.1.01.24.	Honorarium Tim Review LKPD	72.600.000,00
5.2.1.01.25.	Honorarium Tim Review LAKIP	32.350.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.430.113.305,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	33.264.973.305,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.036.250.000,00
5.2.1.02.05.	Honorarium Entri Data	69.850.000,00
5.2.1.02.08.	Honorarium Pengelola Pengumpul Data	15.840.000,00
5.2.1.02.10.	Honorarium Panitia Penghapusan	9.600.000,00
5.2.1.02.11.	Honorarium Panitia Penilai/ Penaksir	9.600.000,00
5.2.1.02.12.	Honorarium Panitia Penjualan	24.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	24.071.939.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.451.209.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	5.620.730.000,00
5.2.1.05.	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1.391.569.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.05.01.	Belanja Pegawai BLUD	1.391.569.000,00
5.2.1.06.	Belanja Pegawai BOS	10.037.675.000,00
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BOS.	10.037.675.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	866.800.110.526,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.611.034.106,62
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.694.812.509,62
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.250.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.423.354.460,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai, dan benda pos	331.710.500,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.911.630.437,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.478.322.600,00
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	62.370.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	634.185.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Dokumentasi	639.597.850,00
5.2.2.01.10.	Belanja Plakat/Souvenir	639.120.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Olahraga	93.093.750,00
5.2.2.01.12.	Belanja Gorden/Vertikal Blind	316.182.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Sajadah	5.350.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Taplak Meja/Bendera/Umbul-umbul	222.300.000,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alas Kasur/Bed Cover	50.700.000,00
5.2.2.01.16.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	6.300.000,00
5.2.2.01.22.	Belanja Komponen Instalasi Air	6.030.000,00
5.2.2.01.23.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau/alat masak	94.725.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.710.980.225,98
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	49.855.898.720,98
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.117.404.000,00
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	51.670.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.491.793.250,00
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	3.457.033.777,00
5.2.2.02.06.	Belanja Perlengkapan Pawai, Bazar, Demo	1.904.854.300,00
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Praktek Belajar/ Pelatihan	2.004.552.000,00
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Makanan Ternak	1.571.240.000,00
5.2.2.02.09.	Belanja Marka Jalan	462.650.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Perlengkapan Perbengkelan	26.505.032,00
5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan/ Minuman	205.080.000,00
5.2.2.02.13.	Belanja Sarana dan Prasarana Produksi	10.000.000,00
5.2.2.02.14.	Belanja Suku Cadang Peralatan Laboratorium	47.122.358,00
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Pendukung Pembangunan dan Perbengkelan	16.455.000,00
5.2.2.02.16.	Belanja Tanah Timbunan	762.104.000,00
5.2.2.02.17.	Belanja Plank Nama	95.900.000,00
5.2.2.02.18.	Belanja bahan uji sample	3.440.000,00
5.2.2.02.20.	Belanja bahan pendukung pelaksanaan kegiatan	3.464.239.588,00
5.2.2.02.25.	Belanja Sembako	32.933.000,00
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Bacaan	2.460.000,00
5.2.2.02.28.	Belanja Pupuk	175.951.000,00
5.2.2.02.29.	Belanja Alat-alat Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pertanian/Perkebunan	51.105.000,00
5.2.2.02.30.	Belanja Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor	413.375.000,00
5.2.2.02.32.	Belanja Kawat Bronjong	487.214.200,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	285.747.811.961,07
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	822.196.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	2.022.144.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	46.218.419.000,00
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	5.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.846.990.700,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.397.214.624,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	50.607.100,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	208.020.881,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan/ Meubiler	4.415.002.400,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa PBB/IMB	40.000.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja jasa service kebersihan	11.068.666.895,00
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pindah Kantor	67.450.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja perawatan kesehatan/obat-obatan	68.492.796,00
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi	9.656.476.648,00
5.2.2.03.18.	Belanja jasa notaris/ licensi/ advice planning	66.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja jasa fumigasi	44.500.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Advokasi	172.500.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja jasa legalisasi	210.000.000,00
5.2.2.03.23.	Belanja Transportasi/ uang saku	34.219.942.350,00
5.2.2.03.24.	Belanja jasa keamanan	9.975.900.327,00
5.2.2.03.25.	Belanja jasa tampilan kesenian/ kebudayaan	475.800.000,00
5.2.2.03.27.	Belanja jasa penyelenggaraan/ penguburan pasien/ orang terlantar	15.600.000,00
5.2.2.03.28.	Belanja jasa pemeliharaan alat-alat kedokteran/ laboratorium	398.556.500,00
5.2.2.03.29.	Belanja jasa penyelenggaraan upacara	23.250.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja administrasi pemungutan retribusi	251.640.000,00
5.2.2.03.31.	Belanja jasa pembongkaran reklame	200.000.000,00
5.2.2.03.32.	Belanja lisensi software	20.000.000,00
5.2.2.03.35.	Belanja kalibrasi alat ukur takar timbang dan perlengkapannya	12.500.000,00
5.2.2.03.36.	Belanja penghargaan atas prestasi kerja	1.236.000.000,00
5.2.2.03.37.	Belanja jasa uji labor	275.616.590,00
5.2.2.03.38.	Belanja Jasa Penyedia Layanan Internet/Telekomunikasi	6.150.000,00
5.2.2.03.48.	Belanja Jasa Pelayanan Publik	3.584.350.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Tenaga Borongan Jangka Waktu	5.452.060.952,00
5.2.2.03.51.	Belanja Jasa Administrasi Perkara Hukum	8.675.000,00
5.2.2.03.52.	Belanja Jasa Restorasi Arsip	52.500.000,00
5.2.2.03.53.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	68.352.096.613,00
5.2.2.03.54.	Belanja Jasa tukang/ buruh	26.111.225.785,07
5.2.2.03.55.	Belanja Resiko Kerja Pelayanan Kebersihan	50.000.000,00
5.2.2.03.56.	Belanja Jasa Alih Media	347.118.800,00
5.2.2.03.58.	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	17.227.400.000,00
5.2.2.03.59.	Belanja Jasa Pengemudi	107.400.000,00
5.2.2.03.61.	Belanja Jasa Tenaga Pengajar	26.913.600.000,00
5.2.2.03.62.	Belanja Jasa Petugas Korsik	217.500.000,00
5.2.2.03.63.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	4.863.950.000,00
5.2.2.03.66.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	820.062.000,00
5.2.2.03.67.	Belanja Jasa Pemusnahan Sampah Medis	127.611.000,00
5.2.2.03.68.	Belanja jasa Visum	17.500.000,00
5.2.2.03.69.	Belanja Jasa Korsik	4.125.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	39.228.835.870,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.604.603.544,00
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	49.300.000,00
5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	29.731.720.660,00
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan	1.818.711.666,00
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Jiwa Ternak	24.500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.005.059.765,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.553.357.515,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.914.481.555,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.548.916.695,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	46.970.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	906.334.000,00
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Izin Mengemudi	35.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.888.599.353,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.666.551.125,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.313.192.228,00
5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Benda Berharga	659.886.000,00
5.2.2.06.05.	Belanja Cetak Stiker	248.970.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.166.554.500,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.571.254.500,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	271.800.000,00
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	30.000.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah/ Pos TPR	293.500.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.782.529.395,33
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.766.529.395,33
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	16.000.000,00
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	81.915.000,00
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	39.617.600,00
5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Molen	42.297.400,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.837.677.550,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	509.046.500,00
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	271.350.000,00
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	27.750.000,00
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	125.250.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.177.000.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	160.000.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Interior/ Eksterior	887.754.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa Taman	64.880.150,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Penerangan/ Lampu	20.000.000,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa AC/Kipas Angin	137.500.000,00
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat musik	166.700.000,00
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Peralatan Menjahit	178.765.000,00
5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Perlengkapan Outbond	12.500.000,00
5.2.2.10.15.	Belanja Sewa Sound System	481.377.450,00
5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Hankie Talkie	300.000,00
5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Perlengkapan Kebencanaan	6.400.000,00
5.2.2.10.24.	Belanja Sewa Karpet	102.550.000,00
5.2.2.10.25.	Belanja Sewa Peralatan Dapur	70.150.000,00
5.2.2.10.27.	Belanja Sewa Peralatan Pembuatan Cinderamata/Aksesoris	3.750.000,00
5.2.2.10.28.	Belanja Sewa Server	372.979.500,00
5.2.2.10.29.	Belanja Sewa Kelengkapan Pelaksana Kegiatan	61.674.950,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.115.721.500,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	892.500.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.743.558.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.440.299.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.503.602.500,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/ pekerja lapangan	3.403.460.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja makan dan minuman pasien	132.302.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.760.319.500,00
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	97.500.000,00
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	226.000.000,00
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	198.000.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	408.540.000,00
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	239.500.000,00
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Dinas Protokoler	72.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Sipil Resmi	230.000.000,00
5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.288.779.500,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.844.386.250,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.241.463.750,00
5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Sipil Petugas Kebersihan	530.042.500,00
5.2.2.13.04.	Belanja Pakaian Kerja untuk Pelayanan	72.880.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.256.423.750,00
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	6.000.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	514.081.750,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	811.050.500,00
5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Jambore	23.500.000,00
5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Keagamaan	195.075.000,00
5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan	368.305.500,00
5.2.2.14.09.	Belanja Pakaian Daerah	338.411.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.642.755.610,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.290.705.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.888.069.550,00
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.463.981.060,00
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	140.400.000,00
5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	140.400.000,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	11.103.444.110,00
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	194.081.110,00
5.2.2.17.03.	Belanja Kepesertaan	10.909.363.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.504.850.850,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	765.125.850,00
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan	159.750.000,00
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman, Tugu, Makam	20.675.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Jalan	55.680.000,00
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	503.620.000,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.027.959.220,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	482.337.938,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.939.703.230,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	209.195.000,00
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan/ Penulisan	4.256.128.726,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Penyelenggara Ujian/ Diklat	574.928.000,00
5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	408.608.000,00
5.2.2.21.08.	Belanja Jasa Konsultansi Kesehatan	157.058.326,00
5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.944.566.717,00
5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	40.558.172.717,00
5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.386.394.000,00
5.2.2.25.	Belanja Akomodasi	11.259.708.750,00
5.2.2.25.01.	Belanja Akomodasi.	11.259.708.750,00
5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Bimbingan Teknis Non PNS dan Kegiatan Lainnya	1.161.826.000,00
5.2.2.27.01.	Belanja Kepesertaan Non PNS	1.161.826.000,00
5.2.2.28.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.984.115.000,00
5.2.2.28.01.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat.	2.928.865.000,00
5.2.2.28.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	55.250.000,00
5.2.2.29.	Belanja Jasa Pelayanan	16.011.841.404,00
5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Pelayanan RSUD	17.500.000,00
5.2.2.29.02.	Belanja Jasa Pelayanan Angkutan	15.994.341.404,00
5.2.2.30.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	4.892.854.000,00
5.2.2.30.01.	Belanja Jasa Penyelenggara Acara/Event Organizer	4.892.854.000,00
5.2.2.31.	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	56.297.439.138,00
5.2.2.31.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.297.439.138,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.32.	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Olahraga	7.500.000,00
5.2.2.32.01.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	7.500.000,00
5.2.2.33.	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.277.075.000,00
5.2.2.33.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	72.277.075.000,00
5.2.2.34.	Belanja Kontribusi	505.926.000,00
5.2.2.34.01.	Belanja Kontribusi Pargelaran/Event	505.926.000,00
5.2.3.	Belanja Modal	527.006.393.049,00
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	44.076.455.550,00
5.2.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan	58.080.000,00
5.2.3.01.34.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	26.008.200.500,00
5.2.3.01.38.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan	18.010.175.050,00
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.350.000.000,00
5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk	1.350.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	10.417.122.000,00
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	2.079.849.900,00
5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	1.446.840.000,00
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	2.043.282.100,00
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	556.770.000,00
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	345.980.000,00
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	494.400.000,00
5.2.3.03.15.	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor becak motor	200.000.000,00
5.2.3.03.18.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor SUV	3.250.000.000,00
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.600.000,00
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	3.600.000,00
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	106.620.000,00
5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	16.200.000,00
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan mesin pemotong rumput	14.820.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Chainsaw	42.000.000,00
5.2.3.08.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Reparatur	33.600.000,00
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	589.792.908,00
5.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan alat pengolah hasil pertanian	10.500.000,00
5.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan	70.000.000,00
5.2.3.09.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Peternakan	509.292.908,00
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	753.276.050,00
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	20.000.000,00
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	18.500.000,00
5.2.3.10.09.	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik	21.600.000,00
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	218.500.000,00
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	62.000.000,00
5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Papan Layanan	100.000.000,00
5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi dan Dokumentasi	304.816.050,00
5.2.3.10.17.	Belanja modal Palet dan Rak Besi Obat	7.860.000,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.642.463.200,00
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	154.950.000,00
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	11.000.000,00
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	194.469.850,00
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	206.000.000,00
5.2.3.11.07.	Belanja Modal AC/ Kipas Angin	1.403.703.850,00
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Genset	246.366.000,00
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Steger	20.000.000,00
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	14.975.000,00
5.2.3.11.11.	Belanja Modal Mesin Absensi	42.617.500,00
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Tangga Lipat Aluminium	4.545.000,00
5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Koran	3.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Locker	47.700.000,00
5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	67.000.000,00
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Mesin Antrian	157.086.000,00
5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Plank Nama	69.050.000,00
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.342.680.586,00
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	2.972.056.501,00
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	1.899.922.000,00
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer notebook/ Laptop	4.382.200.800,00
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.006.540.200,00
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	130.019.625,00
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	161.050.653,00
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	384.250.000,00
5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan/ Pendukung komputer	95.948.250,00
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	334.947.157,00
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software	700.745.400,00
5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Router	40.000.000,00
5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan Rak Server	45.000.000,00
5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin KIOSK	190.000.000,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11.679.041.700,00
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1.409.522.750,00
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	150.750.000,00
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.155.426.550,00
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	592.375.000,00
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	373.850.000,00
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	91.100.000,00
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	301.285.000,00
5.2.3.13.10.	Belanja modal meja komputer	12.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	1.731.667.400,00
5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	305.450.000,00
5.2.3.13.14.	Belanja modal pengadaan meja belajar	5.326.920.000,00
5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Podium/ Mimbar	16.430.000,00
5.2.3.13.19.	Belanja Modal Pengadaan Partisi Kantor	32.500.000,00
5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian	70.000.000,00
5.2.3.13.21.	Belanja Modal Kursi Tunggu Pelayanan	109.765.000,00
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	466.267.000,00
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	2.660.000,00
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	159.770.000,00
5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan	5.000.000,00
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	105.650.000,00
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	88.367.000,00
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring	28.450.000,00
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	24.000.000,00
5.2.3.14.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemanas	4.200.000,00
5.2.3.14.09.	Belanja modal pengadaan peralatan masak	15.570.000,00
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Lemari Dapur Atas Gantung	15.000.000,00
5.2.3.14.14.	Pengadaan Lemari Pembatas	15.000.000,00
5.2.3.14.17.	Belanja Modal Pengadaan Panci	500.000,00
5.2.3.14.18.	Belanja Modal Pengadaan Blender	2.100.000,00
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	424.730.000,00
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias	20.000.000,00
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	4.600.000,00
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan karpet	116.580.000,00
5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pembatas Ruangan/ Terali	236.400.000,00
5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Figura	21.650.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pengadaan Lambang Burung Garuda	500.000,00
5.2.3.15.09.	Belanja Modal Bunga Hias Ruangan	25.000.000,00
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.399.302.200,00
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	88.800.000,00
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	20.000.000,00
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	1.052.700.200,00
5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan televisi	619.802.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja modal pengadaan perekam	25.000.000,00
5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	247.000.000,00
5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	346.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.638.195.530,00
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	63.775.500,00
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	6.000.000,00
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	183.700.000,00
5.2.3.17.08.	Belanja modal Sound System	896.620.030,00
5.2.3.17.12.	Belanja Modal Pengadaan Repiter	120.000.000,00
5.2.3.17.13.	Belanja Modal Instalasi Jaringan Komunikasi	65.000.000,00
5.2.3.17.15.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	303.100.000,00
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	18.120.417.860,00
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	4.484.673.860,00
5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	13.635.744.000,00
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	6.685.440.100,00
5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	133.000.000,00
5.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	88.200.000,00
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	48.500.000,00
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	6.415.740.100,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	123.119.620.375,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	87.198.001.375,00
5.2.3.21.05.	Belanja modal pengadaan alat perlengkapan jalan	887.250.000,00
5.2.3.21.07.	Belanja Modal Konstruksi Trotoar	35.034.369.000,00
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	20.928.384.900,00
5.2.3.22.05.	Belanja Modal Konstruksi Jembatan	20.928.384.900,00
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	60.961.058.950,00
5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan	6.245.000.000,00
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	5.387.316.000,00
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	3.217.520.000,00
5.2.3.23.09.	Belanja Modal Saluran/Drainase	39.790.000.000,00
5.2.3.23.10.	Belanja Modal Normalisasi sungai	2.850.000.000,00
5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam	431.222.950,00
5.2.3.23.14.	Belanja Modal Pengadaan Pipa	40.000.000,00
5.2.3.23.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Instalasi Air Limbah	3.000.000.000,00
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	10.228.453.900,00
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan/jembatan	400.000.000,00
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	441.300.000,00
5.2.3.24.06.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum	6.619.000.000,00
5.2.3.24.07.	Belanja Modal Rehabilitasi/Perbaikan Lampu PJU	2.768.153.900,00
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	1.006.694.000,00
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	374.500.000,00
5.2.3.25.03.	Belanja modal pengadaan instalasi air	148.255.000,00
5.2.3.25.04.	Belanja modal Tower	34.800.000,00
5.2.3.25.06.	Belanja modal penambahan kapasitas/daya listrik	109.540.000,00
5.2.3.25.07.	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	60.200.000,00
5.2.3.25.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	279.399.000,00
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	153.805.096.124,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	50.801.425.856,00
5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	721.424.000,00
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan	1.285.875.700,00
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembangunan gedung	2.539.919.850,00
5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembangunan tempat ibadah	5.098.800.000,00
5.2.3.26.15.	Belanja modal Pengadaan Outlet	2.025.983.500,00
5.2.3.26.17.	Belanja modal konstruksi tapal batas	2.716.750.000,00
5.2.3.26.19.	Belanja modal Konstruksi Fasilitas Umum	40.896.834.720,00
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Konstruksi Rangka Besi/Banner	150.000.000,00
5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Paving Block	3.754.588.000,00
5.2.3.26.23.	Belanja Modal Turap/Talud/Bronjong	4.170.000.000,00
5.2.3.26.25.	Belanja Modal Konstruksi Billboard	100.000.000,00
5.2.3.26.27.	Belanja Modal Konstruksi Fasilitas Kebersihan	807.380.150,00
5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembuatan Taman	3.069.550.000,00
5.2.3.26.34.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	35.616.564.348,00
5.2.3.26.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Berpindah/ Gazebo	50.000.000,00
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.376.901.600,00
5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	190.000.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	90.000.000,00
5.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	155.000.000,00
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	1.454.851.000,00
5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	95.000.000,00
5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	90.500.000,00
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	85.000.000,00
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	55.770.600,00
5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kepemimpinan, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	780.000,00
5.2.3.27.32.	Belanja Modal Pengadaan Buku Tata Boga dan Tata Busana	75.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.27.36.	Belanja Modal Pengadaan Buku Cerita Anak - Anak	85.000.000,00
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	15.000.000,00
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik	15.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	117.650.000,00
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman	117.650.000,00
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	3.000.000,00
5.2.3.30.16.	Belanja Modal Pengadaan Security Lock	3.000.000,00
5.2.3.31.	Belanja Modal Perencanaan	5.750.000.000,00
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Perencanaan Konstruksi Bangunan	1.400.000.000,00
5.2.3.31.02.	Belanja Modal Perencanaan Konstruksi Jalan	1.527.692.300,00
5.2.3.31.03.	Belanja Modal Perencanaan Konstruksi Irigasi	190.000.000,00
5.2.3.31.04.	Belanja Modal Perencanaan Konstruksi Drainase	289.050.000,00
5.2.3.31.05.	Belanja Modal Perencanaan Konstruksi Jembatan	683.257.700,00
5.2.3.31.06.	Belanja Modal Perencanaan Konstruksi Fasilitas Umum	1.350.000.000,00
5.2.3.31.07.	Belanja Modal Perencanaan Konstruksi Sungai	310.000.000,00
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk	234.500.000,00
5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk.	234.500.000,00
5.2.3.33.	Belanja Modal BOS	27.438.250.000,00
5.2.3.33.01.	Belanja Modal BOS.	27.438.250.000,00
5.2.3.35.	Belanja modal sarana prasarana persampahan	521.400.000,00
5.2.3.35.02.	Belanja modal bak sampah	26.400.000,00
5.2.3.35.03.	Belanja modal kubus apung	495.000.000,00
5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat dan Kelengkapan Kebencanaan	443.428.000,00
5.2.3.37.01.	Belanja Modal Tenda Darurat	60.200.000,00
5.2.3.37.04.	Belanja Modal Alat Kelengkapan Kebencanaan	383.228.000,00
5.2.3.39.	Belanja Modal Alat-alat Olahraga	16.783.000,00
5.2.3.39.02.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Tennis Meja	6.463.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.39.04.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Bulu Tangkis	4.220.000,00
5.2.3.39.15.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Futsal	2.800.000,00
5.2.3.39.20.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Volly Ball	3.300.000,00
5.2.3.41.	Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah	5.241.851.696,00
5.2.3.41.01.	Belanja Modal BLUD	5.241.851.696,00
5.2.3.42.	Belanja Modal Tambahan Perlengkapan Angkutan Bermotor	10.000.000,00
5.2.3.42.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tambahan/Interior Kendaraan	10.000.000,00
5.2.3.43.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kerja Lapangan	5.662.500,00
5.2.3.43.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Digital Distometer	5.662.500,00
5.2.3.44.	Belanja Modal Pendukung Pelaksana Kegiatan	26.366.000,00
5.2.3.44.01.	Belanja Modal Bahan Material Pendukung Pelaksana Kegiatan	26.366.000,00
5.2.3.46.	Belanja Modal Pematangan Lahan	1.060.887.320,00
5.2.3.46.02.	Belanja Modal Pematangan Lahan Sekolah	1.060.887.320,00
	JUMLAH BELANJA	2.745.995.435.458,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(58.788.999.818,00)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	58.788.999.818,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	100.000.000.000,00
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000.000,00
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	50.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.211.000.182,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	15.000.000.000,00
6.2.2.02.01.	PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)	5.000.000.000,00
6.2.2.02.02.	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG (PDAM)	10.000.000.000,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	26.211.000.182,00
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank kepada pihak ketiga	26.211.000.182,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.211.000.182,00
	PEMBIAYAAN NETO	58.788.999.818,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

PEMERINTAH KOTA PADANG

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

Hal 1 dari 4

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	101.031.280.534,00	825.232.013.713,88	878.765.017.994,67	1.703.997.031.708,55
1.01.	PENDIDIKAN	-	638.378.991.890,08	271.990.490.598,00	910.369.482.488,08
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	-	638.378.991.890,08	271.990.490.598,00	910.369.482.488,08
1.02.	KESEHATAN	69.640.480.534,00	143.916.728.525,93	175.916.993.630,00	319.833.722.155,93
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	39.186.400.000,00	108.877.744.972,67	119.751.042.630,00	228.628.787.602,67
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30.454.080.534,00	35.038.983.553,26	56.165.951.000,00	91.204.934.553,26
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.500.000.000,00	14.631.759.617,01	253.539.099.405,67	268.170.859.022,68
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.500.000.000,00	14.631.759.617,01	253.539.099.405,67	268.170.859.022,68
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.257.300.000,00	6.509.492.854,24	131.376.494.265,00	137.885.987.119,24
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.257.300.000,00	6.509.492.854,24	131.376.494.265,00	137.885.987.119,24
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.633.500.000,00	16.844.166.968,18	29.150.638.150,00	45.994.805.118,18
1.05.01.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.633.500.000,00	6.740.571.900,00	4.614.781.500,00	11.355.353.400,00
1.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	10.103.595.068,18	24.535.856.650,00	34.639.451.718,18
1.06.	SOSIAL	-	4.950.873.858,44	16.791.301.946,00	21.742.175.804,44
1.05.01.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-	-	7.012.354.500,00	7.012.354.500,00
1.06.01.	DINAS SOSIAL	-	4.950.873.858,44	9.778.947.446,00	14.729.821.304,44
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	57.272.193.003,00	88.964.511.895,53	183.506.849.452,00	272.471.361.347,53
2.01.	TENAGA KERJA	-	5.866.502.700,07	5.536.147.000,00	11.402.649.700,07
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	5.866.502.700,07	5.536.147.000,00	11.402.649.700,07
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	6.415.994.740,00	5.755.739.000,00	12.171.733.740,00
2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB	-	6.415.994.740,00	5.755.739.000,00	12.171.733.740,00
2.03.	PANGAN	-	2.743.222.795,97	2.580.064.000,00	5.323.286.795,97
2.03.01.	DINAS PANGAN	-	2.743.222.795,97	2.580.064.000,00	5.323.286.795,97
2.04.	PERTANAHAN	-	-	27.371.525.560,00	27.371.525.560,00
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	-	-	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	18.815.000.000,00	18.815.000.000,00
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	1.056.525.560,00	1.056.525.560,00
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	19.142.670.600,00	29.158.757.319,03	43.887.632.000,00	73.046.389.319,03
2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.142.670.600,00	29.158.757.319,03	43.854.632.000,00	73.013.389.319,03
4.08.01.	KECAMATAN PADANG BARAT	-	-	33.000.000,00	33.000.000,00
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	1.500.000.000,00	6.061.445.195,37	7.255.273.500,00	13.316.718.695,37

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.500.000.000,00	6.061.445.195,37	7.255.273.500,00	13.316.718.695,37
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	72.000.000,00	72.000.000,00
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	-	72.000.000,00	72.000.000,00
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	8.080.141.500,00	8.080.141.500,00
2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB	-	-	8.080.141.500,00	8.080.141.500,00
2.09.	PERHUBUNGAN	29.125.522.403,00	14.779.274.004,54	33.229.068.500,00	48.008.342.504,54
2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	29.125.522.403,00	14.779.274.004,54	33.229.068.500,00	48.008.342.504,54
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.760.000.000,00	4.421.708.544,49	12.098.967.242,00	16.520.675.786,49
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.760.000.000,00	4.421.708.544,49	8.078.344.000,00	12.500.052.544,49
4.02.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	2.290.976.642,00	2.290.976.642,00
4.02.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	1.669.646.600,00	1.669.646.600,00
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	4.928.693.310,00	11.895.801.950,00	16.824.495.260,00
2.11.01.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	4.928.693.310,00	11.895.801.950,00	16.824.495.260,00
2.12.	PENANAMAN MODAL	200.000.000,00	6.171.339.728,99	8.057.388.200,00	14.228.727.928,99
2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200.000.000,00	6.171.339.728,99	7.959.003.200,00	14.130.342.928,99
5.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	98.385.000,00	98.385.000,00
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.544.000.000,00	4.220.428.758,60	9.986.572.000,00	14.207.000.758,60
2.13.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.544.000.000,00	4.220.428.758,60	9.986.572.000,00	14.207.000.758,60
2.14.	STATISTIK	-	-	415.000.000,00	415.000.000,00
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	415.000.000,00	415.000.000,00
2.15.	PERSANDIAN	-	-	-	-
2.16.	KEBUDAYAAN	-	-	3.275.175.000,00	3.275.175.000,00
3.02.01.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	3.275.175.000,00	3.275.175.000,00
2.17.	PERPUSTAKAAN	-	4.197.144.798,47	3.420.820.000,00	7.617.964.798,47
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	4.197.144.798,47	3.420.820.000,00	7.617.964.798,47
2.18.	KEARSIPAN	-	-	589.534.000,00	589.534.000,00
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	589.534.000,00	589.534.000,00
3.	URUSAN PILIHAN	30.510.191.339,74	36.506.745.303,70	68.396.979.848,00	104.903.725.151,70
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.500.000.000,00	5.176.229.268,60	10.855.895.098,00	16.032.124.366,60
3.01.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.500.000.000,00	5.176.229.268,60	10.855.895.098,00	16.032.124.366,60
3.02.	PARIWISATA	4.960.000.000,00	5.158.916.680,60	7.584.738.200,00	12.743.654.880,60
3.02.01.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.960.000.000,00	5.158.916.680,60	7.584.738.200,00	12.743.654.880,60
3.03.	PERTANIAN	1.386.000.000,00	14.164.234.828,06	20.071.477.303,00	34.235.712.131,06
3.03.01.	DINAS PERTANIAN	1.386.000.000,00	14.164.234.828,06	20.071.477.303,00	34.235.712.131,06
3.04.	KEHUTANAN	-	-	1.247.834.697,00	1.247.834.697,00
3.03.01.	DINAS PERTANIAN	-	-	1.247.834.697,00	1.247.834.697,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
3.06.	PERDAGANGAN	19.664.191.339,74	12.007.364.526,44	24.479.362.700,00	36.486.727.226,44
3.06.01.	DINAS PERDAGANGAN	19.664.191.339,74	12.007.364.526,44	24.479.362.700,00	36.486.727.226,44
3.07.	PERINDUSTRIAN	-	-	4.157.671.850,00	4.157.671.850,00
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	-	-	4.157.671.850,00	4.157.671.850,00
3.08.	TRANSMIGRASI	-	-	-	-
4.	PENUNJANG URUSAN	2.498.392.770.763,26	246.802.312.745,89	241.426.712.245,33	488.229.024.991,22
4.01.	PERENCANAAN	-	5.598.033.331,33	10.466.810.050,00	16.064.843.381,33
4.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	5.598.033.331,33	9.918.905.050,00	15.516.938.381,33
5.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	547.905.000,00	547.905.000,00
4.02.	KEUANGAN	2.498.392.770.763,26	131.554.773.849,55	47.669.435.885,33	179.224.209.734,88
2.13.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	225.000.000,00	225.000.000,00
4.02.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.843.885.969.082,90	91.444.583.731,36	31.264.490.235,33	122.709.073.966,69
4.02.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	654.506.801.680,36	40.110.190.118,19	16.179.945.650,00	56.290.135.768,19
4.03.	KEPEGAWAIAN	-	6.425.813.243,62	12.631.471.800,00	19.057.285.043,62
4.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	6.425.813.243,62	12.631.471.800,00	19.057.285.043,62
4.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
4.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	1.251.000.000,00	1.251.000.000,00
4.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	1.251.000.000,00	1.251.000.000,00
4.06.	PENGAWASAN	-	7.931.991.824,00	9.370.915.950,00	17.302.907.774,00
4.06.01.	INSPEKTORAT	-	7.931.991.824,00	9.370.915.950,00	17.302.907.774,00
4.08.	KEWILAYAHAN	-	95.291.700.497,39	160.037.078.560,00	255.328.779.057,39
4.08.01.	KECAMATAN PADANG BARAT	-	8.368.874.917,40	11.509.436.800,00	19.878.311.717,40
4.08.02.	KECAMATAN PADANG TIMUR	-	8.692.895.402,20	13.917.437.500,00	22.610.332.902,20
4.08.03.	KECAMATAN PADANG UTARA	-	7.238.523.813,24	11.620.392.900,00	18.858.916.713,24
4.08.04.	KECAMATAN PADANG SELATAN	-	10.309.042.361,94	16.957.158.090,00	27.266.200.451,94
4.08.05.	KECAMATAN NANGGALO	-	8.020.208.664,26	9.417.996.320,00	17.438.204.984,26
4.08.06.	KECAMATAN KURANJI	-	9.635.502.870,21	17.352.135.000,00	26.987.637.870,21
4.08.07.	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	-	12.313.268.664,56	20.480.977.500,00	32.794.246.164,56
4.08.08.	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	-	6.846.032.384,86	10.400.628.000,00	17.246.660.384,86
4.08.09.	KECAMATAN PAUH	-	7.773.544.683,67	13.611.658.250,00	21.385.202.933,67
4.08.10.	KECAMATAN KOTO TANGAH	-	10.596.584.832,40	24.573.632.000,00	35.170.216.832,40
4.08.11.	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	-	5.497.221.902,65	10.195.626.200,00	15.692.848.102,65
5.	URUSAN PENDUKUNG	-	56.073.027.515,42	101.367.382.840,00	157.440.410.355,42
5.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	22.955.459.631,02	48.111.241.840,00	71.066.701.471,02
5.01.02.	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	-	1.508.296.229,90	-	1.508.296.229,90
5.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH	-	21.447.163.401,12	48.111.241.840,00	69.558.405.241,12
5.02.	SEKRETARIAT DPRD	-	33.117.567.884,40	53.256.141.000,00	86.373.708.884,40
5.02.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	26.877.577.593,00	-	26.877.577.593,00
5.02.01.	SEKRETARIAT DPRD	-	6.239.990.291,40	53.256.141.000,00	59.496.131.291,40
6.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	7.217.311.903,58	11.736.570.000,00	18.953.881.903,58

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	7.217.311.903,58	11.736.570.000,00	18.953.881.903,58
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
2.13.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	54.970.000,00	54.970.000,00
4.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00
6.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	2.622.704.797,78	4.556.669.000,00	7.179.373.797,78
6.01.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	4.594.607.105,80	7.053.931.000,00	11.648.538.105,80
Jumlah		2.687.206.435.640,00	1.260.795.923.078,00	1.485.199.512.380,00	2.745.995.435.458,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(58.788.999.818)			
Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
4.	PENUNJANG URUSAN	100.000.000.000,00	41.211.000.182,00	58.788.999.818,00	-
4.02.	KEUANGAN	100.000.000.000,00	41.211.000.182,00	58.788.999.818,00	-
4.02.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100.000.000.000,00	41.211.000.182,00	58.788.999.818,00	-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI